

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI DENGAN KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI DKI, KEPALA BNN PROVINSI DKI DAN KAKANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI DKI

I. Penjelasan Kejati DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut

1. Perkara yang menonjol di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 dan Tahun 2018:
 - Perkara menyebarkan berita bohong/ujaran kebencian bermuatan SARA dan penodaan agama menggunakan sarana ITE atas nama tersangka Mohammad Rizieq Syihab dengan status perkara dikembalikan ke Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 6 April 2017; terpidana Ir. Darmawan putusan PN pidana penjara 2 tahun 6 bulan; terpidana Jamron dengan putusan PN pidana penjara 6 bulan 15 hari; terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama dengan Putusan PN pidana penjara 2 tahun; terdakwa Alfian Tanjung dengan putusan PN bebas; dan terdakwa Ahmad Dhani masih dalam proses persidangan.
 - Selain itu terdapat perkara pornografi dengan menggunakan sarana ITE dengan tersangka M Rizieq Syihab dan Firza Husen Maskaty dengan status SPDP dikembalikan ke Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 21 November 2017.
 - Perkara penyalahgunaan narkoba dengan terpidana Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama dengan status Putusan PN menjalani rehabilitasi selama 10 bulan di RSKO Cibubur.
 - Perkara terorisme atas terpidana Oman Rochman alias Aman Abdurrahman dengan Putusan PN pidana mati; terpidana Ghilman Omar Harridhi alias Omar dengan Putusan PN pidana penjara 3 tahun 6 bulan; dan Pengibaran bendera ISI di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Perkara menyebarkanberitabohong/ujaran kebencianbermuatan SARA danpenodaan agama dengan menggunakan sarana Informasi Transaksi Eletronik (ITE) atas nama terdakwa Arseto Suryoadji, perkara tersebut dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan.
 - Perkara melakukan pengancaman dengan menggunakan sarana Informasi Transaksi Eletronik (ITE) atas nama terdakwa Royson Jordany Tjahya, berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati DKI Jakarta.
 - Perkara penyalahgunaan Narkotika Irwan Susetyo als Tyo Pakusadewo bin Setiono Harjo dalam Proses Sidang dengan agenda pledoi; Jennifer Dunn Putusan PN dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 2 (dua) bulan (**Terdakwa Banding**); Roro Fitria dalam proses persidangan; dan Dhawiya dalam proses persidangan.
 - Perbandingan perkara Tindak Pidana Umum dengan perkara Narkotika Tahun 2017 dan 2018.

No.	Tahun	Perkara Tindak Pidana Umum	Perkara Narkotika	Persentase
1.	Jan-Des 2017	10200	4295	42%
2.	Jan-Juni 2018	5084	1793	35%

Hambatan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan terorisme : Dibutuhkan ekstra pengamanan terhadap jalannya persidangan; Kurangnya tenaga jaksa dalam penanganan perkara terorisme yang banyak diterima Direktorat Satgas Terorisme; dan Pengamanan yang ketat dalam jalannya proses persidangan.

2. Perkara tindak pidana terorisme yang ditangani beserta kendala yang dihadapi :

- Tahun 2017-2018 tidak ada pelaksanaan hukum mati terhadap terpidana mati terorisme.
- Ada 3 (tiga) terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan : IWAN DARMAWAN MUTHO alias ROIS alias FAJAR alias ABDUL FATAH alias DARMA alias YADI alias MUHAMMAD TAUFIK alias RIDHO alias HENDI. (Pengeboman di depan Dubes Australia) dan ACHMAD HASAN alias AGUNG CAHYONO (Pengeboman di depan Dubes Australia dimana Kedua terpidana tersebut di atas belum dilakukan eksekusi karena terpidana IWAN DARMAWAN MUTHO dan terpidana ACHMAD HASAN masih akan melakukan upaya hukum PK. Selanjutnya Oman RochmanalsAman Abdurrahman als Abu Sulaiman bin Ade Sudarma (Pengeboman di jalan Thamrin) Terpidana Oman Rochman baru di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2018 dan sampai sekarang terpidana dan penasehat hukum belum mengajukan upaya hukum.

3. Langkah-langkah dalam meningkatkan mutu, profesional dan integritas moral para Jaksa di Prov. DKI Jakarta :

- a. Pelaksanaan pengawasan melekat secara ketat melalui pola kakak asuh dan inspeksi.
- b. Apel Integritas.
- c. Patroli pengawasan.
- d. Melakukan diklat – diklat khusus.
- e. Melakukan in housetraining.

II. Penjelasan Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan penyelidikan, melakukan operasi bersih narkoba (besinar), Pada tahun 2017 terdapat 595 laporan masyarakat.
- Pelaksanaan operasi bersinar di tempat hiburan; kos-kosan; dan apartemen. Dari operasi bersinar yang dilakukan tertangkap sebanyak 588 orang dan dilakukan rehabilitasi.
- Kendala dalam pemberantasan minimnya petugas BNNP di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13 orang, minimnya perlengkapan dan monitor, anggaran yang kurang mencukupi, dibantu Pemprov DKI Jakarta melalui hibah.
- Dilakukan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui program advokasi dan diseminasi.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas anatara lain minimnya pengetahuan P4GN oleh instansi terkait lainnya.
- Mengikutsertakan Dinas terkait dalam program penyuluhan dan sosialisasi.

- Peningkatan dan penguatan layanan rehabilitasi.
- Capaian tahun 2017 target layanan rehabilitasi sebanyak 643 orang dan memenuhi target.
- Pelaksanaan P4GN mengacu pada petunjuk dan pedoman BNN Pusat.

III. Penjelasan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut:

- Perbaikan yang dilakukan terkait bangunan fisik belum ada perbaikan karena bangunan masih abru, berkaitan dengan rutan wanita berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan.
- Dalam mengatasi over kapasitas adalah mengoptimalkan hak-hak warga binaan seperti remisi, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat.
- Upaya mengatasi penyelundupan dan peredaran narkoba di LAPAS dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi intelijen untuk mengetahui pergerakan atau aktivitas para Bandar di dalam LAPAS; mengoptimalkan pengeledahan barang, badan, dan kendaraan di Lapas dan Rutan; Optimalisasi sarana pengamanan dan body detector.
- Upaya pemberantasan pungli dengan membentuk tim saber pungli kanwil kumham DKI Jakarta.
- Kebijakan pelayanan prima melalui pengembangan sistem pelayanan pemberian paspor di berbagai wilayah Indonesia; meningkatkan pelayanan yang terintegrasi melalui satu pintu (*one stop service*) dan sudah diterapkan diseluruh kantor wilayah kumham seluruh Jakarta.
- Solusi pemecahan antara lain dilakukan pencetakan paspor diluar jam pelayanan dan melakukan pelayanan paspor pada hari libur dan dilakukan sosialisasi secara kontinyu bahwa Paspor merupakan jatidiri Warga Negara Republik Indonesia.

IV. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- Bagaimana kesiapan Kejaksaan menghadapi Pemilu? Sebab nanti akan banyak terjadi pelanggaran pemilu dan akan muncul kasus-kasus ujaran kebencian.
- Kepada BNNP apakah tempat atau kantor BNNP untuk rehabilitasi sudah siap dan memadai? Kenapa belum ada BNK diseluruh Jakarta apa yang menjadi kendala?
- Kepada Kejaksaan Tinggi apakah kasus yang sama dengan pelaku dan modus yang sama dapat dituntut dua kali?
- Kepada Kanwil Kemenkumham, perlu ada dorongan dari daerah untuk memberikan data yang real terkait kekurangan fasilitas dan sarana prasarana kepada Kemenkumham agar mendapat perhatian.
- Terkait tuntutan terhadap Jenifer Dunn dituntut 8 bulan tetapi di putus 4 tahun, apa yang membuat perbedaan yan jauh?
- Terkait dengan LAPAS banyak info yang masuk sangat mudah bagi penghuni lapas untuk keluar masuk, mohon untuk di cek.
- Bagaimana kelanjutan kasus investasi bodong?
- BNNP pekerjaannya paling berat di Jakarta, dalam menghadapi Asian Games apakah BNNP memiliki langkah-langkah khusus untuk mengatasi persoalan peredaran narkoba? Mengingat Jakarta adalah ibukota Negara dan dunia hiburan terpusat di Jakarta, juga banyak artis yang tertangkap akibat narkoba.
- Persoalan Lapas dan imigrasi khususna pengawasan tenaga kerja asing, kenapa napi teroris dapat berkumpul hingga 157 orang di Mako Brimob dan siapa yang bertanggungjawab?

- Fakta dilapangan sangat berbeda dengan keinginan yang diharapkan, apa hambatannya sehingga target banyak yang meleset?
- Memberi apresiasi kepada BNNP yang bekerjasama dengan Dishub DKI dalam melakukan tes urine pengemudi angkutan pada mudik lebaran, kenapa banyak artis-artis yang terjerat narkoba kebanyakan hanya di rehab terkesan berbeda dengan yang dialami masyarakat?
- Apakah ada keterlibatan pegawai Kanwil Kemenkumham di tangkap terkait peredaran narkoba di LP Cipinang beberapa bulan lalu?

V. Penjelasan Kajati, Kepala BNNP dan Kakanwil Hukum dan HAM, sebagai berikut :

Kajati :

- 1) Mengenai kesiapan menghadapi pemilu tahun depan, membentuk tim jaksa khusus untuk menangani perkara pemilu dengan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, dan terkait ujaran kebencian menyiapkan penambahan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti.
- 2) Mengenai kasus yang dilakukan oleh orang yang sama dengan perkara yang sama diatur dalam pasal 76 KUHP, tidak boleh dilakukan penuntutan dua kali terhadap orang yang sama dan perkara yang sama. Tetapi terdapat kasus yang bervariasi dan terkadang tidak termasuk *nebis in idem*. Oleh sebab itu benar-benar harus dilihat secara rigid apakah melanggar azas tersebut atau tidak.
- 3) Terhadap kasus Jenifer Dunn, adanya gap/perbedaan putusan dengan tuntutan sedang dilakukan upaya hukum banding.

Kepala BNNP :

- 1) Kantor BNNP Jakarta adalah barometer penanganan narkoba seluruh Indonesia, punya 5 wilayah hukum hingga Pulau Seribu namun hanya memiliki 3 BNNK (Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan) dan BNNP yang belum memiliki kantor dan masih meminjam gedung Diknas dan Kantor masih dalam tahap pembangunan yang akan selesai pada Bulan Mei 2019.
- 2) Kendala belum terbentuknya BNNK Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, usulan dari Pemda bukan dari BNN Pusat yang nantinya akan dibuatkan Naskah Akademik bahwa dibutuhkan BNNK tambahan.
- 3) Terkait artis banyak yang direhabilitasi, ditangkap oleh kepolisian, BNNP melakukan asesmen terpadu dan memberikan rekomendasi apakah ybs sebagai pemakai, pengedar, masuk dalam sindikat atau tidak dan hakim yang menentukan ybs direhab atau tidak.

Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta :

- 1) Terkait tahanan yang sakit ada prosedur yang harus dilakukan, saat ini sudah ada RS pengayoman dan apabila tidak dapat mengakomodir maka akan dirujuk ke RS OMNI dan RS MH Thamrin.
- 2) Terkait pelayanan hukum bagi rakyat miskin dapat tersentuh Kanwil Hukum dan HAM, terkait aparatur yang terlibat sudah diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

Penutup

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

